



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Juni 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk

- membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp186.284.920.305,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.065.968.159.305,00 (tiga triliun enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp2.879.683.239.000,00 |
| b. Bertambah | Rp186.284.920.305,00 |
| Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp3.065.968.159.305,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp3.080.300.038.200,00 |
| b. Bertambah | Rp146.789.480.626,00 |
| Jumlah belanja Daerah setelah perubahan | Rp3.227.089.518.826,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1). Semula | Rp 214.116.799.200,00 |

2). Berkurang	Rp44.495.439.679,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp169.621.359.521,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp13.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp5.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp8.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp161.121.359.521,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah	
1). Semula	Rp706.445.652.000,00
2). Bertambah	Rp24.278.627.000,00
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp730.724.279.000,00
b. Pendapatan transfer	
1). Semula	Rp2.173.237.587.000,00
2). Bertambah	Rp162.006.293.305,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.335.243.880.305,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1). Semula	Rp370.066.609.000,00
2). Berkurang	Rp22.978.976.000,00
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp347.087.633.000,00
b. Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp309.707.181.000,00
2). Bertambah	Rp37.600.000.000,00
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp347.307.181.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1). Semula	Rp17.530.000.000,00
2). Bertambah	Rp2.857.603.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp20.387.603.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	
1). Semula	Rp9.141.862.000,00

2). Bertambah	Rp6.800.000.000,00
jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp15.941.862.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a. Transfer pemerintah pusat	
1). Semula	Rp2.022.277.997.000,00
2). Bertambah	Rp153.103.151.305,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.175.381.148.305,00
b. Transfer antar Daerah	
1). Semula	Rp150.959.590.000,00
2). Bertambah	Rp8.903.142.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp159.862.732.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1). Semula	Rp2.261.622.487.612,00
2). Bertambah	Rp54.691.521.419,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp2.316.314.009.031,00
b. Belanja modal	
1). Semula	Rp312.820.309.788,00
2). Bertambah	Rp97.668.471.007,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp410.488.780.795,00
c. Belanja tidak terduga	
1). Semula	Rp 10.000.000.000,00
2). Berkurang	Rp 7.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00
d. Belanja transfer	
1). Semula	Rp495.857.240.800,00
2). Berkurang	Rp1.429.488.200,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp497.286.729.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1). Semula	Rp1.248.330.340.753,00
2). Berkurang	Rp24.852.776.329,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.223.477.564.424,00
b. Belanja barang dan Jasa	

1). Semula	Rp918.732.491.359,00
2). Bertambah	Rp58.850.402.748,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp977.582.894.107,00
c. Belanja hibah	
1). Semula	Rp72.279.255.500,00
2). Bertambah	Rp20.423.895.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp92.703.150.500,00
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp22.280.400.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp270.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp22.550.400.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah	
1). Semula	Rp0,00
2). Bertambah	Rp9.222.287.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 9.222.287.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1). Semula	Rp84.142.263.753,00
2). Bertambah	Rp36.031.849.650,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp120.174.113.403,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1). Semula	Rp95.560.309.165,00
2). Berkurang	Rp11.900.363.013,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp83.659.946.152,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1). Semula	Rp109.674.493.620,00
2). Bertambah	Rp68.065.446.480,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp177.739.940.100,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1). Semula	Rp23.131.743.250,00
2). Berkurang	Rp3.670.528.190,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp19.461.215.060,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1). Semula	Rp311.500.000,00
2). Berkurang	Rp80.220.920,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 231.279.080,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

a. Belanja tidak terduga	
1). Semula	Rp10.000.000.000,00

2). Berkurang	Rp7.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga	Rp3.000.000.000,00
setelah perubahan	
a. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :	
a. Belanja bagi hasil	
1). Semula	Rp40.192.149.300,00
2). Berkurang	Rp14.292.149.300,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp25.900.000.000,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp455.665.091.500,00
2) Bertambah	Rp15.721.637.500,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp471.386.729.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1). Semula	Rp214.116.799.200,00
2). Berkurang	Rp44.495.439.679,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp169.621.359.521,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1). Semula	Rp 13.500.000.000,00
2). Berkurang	Rp5.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 8.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp212.616.799.200,00
2) Berkurang	Rp44.495.439.679,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp 168.121.359.521,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp 1.500.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal Daerah	
1). Semula	Rp12.500.000.000,00
2). Berkurang	Rp5.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp7.500.000.000,00
b. Pemberian pinjaman Daerah	
1). Semula	Rp1.000.000.000,00
2). Bertambah/Berkurang	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,

		dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n.	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya;
o.	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>multi years</i>)
p.	Lampiran XVI	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
q.	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah
r.	Lampiran XVIII	Daftar Dana Cadangan

Pasal 11

- (1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH :



KABUPATEN TEGAL
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.445.652.000,00	730.724.279.000,00	24.278.627.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	370.066.609.000,00	347.087.633.000,00	-22.978.976.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	309.707.181.000,00	347.307.181.000,00	37.600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.530.000.000,00	20.387.603.000,00	2.857.603.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.141.862.000,00	15.941.862.000,00	6.800.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.173.237.587.000,00	2.335.243.880.305,00	162.006.293.305,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.022.277.997.000,00	2.175.381.148.305,00	153.103.151.305,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.959.590.000,00	159.862.732.000,00	8.903.142.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.879.683.239.000,00	3.065.968.159.305,00	186.284.920.305,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.261.622.487.612,00	2.316.314.009.031,00	54.691.521.419,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.248.330.340.753,00	1.223.477.564.424,00	-24.852.776.329,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.732.491.359,00	977.582.894.107,00	58.850.402.748,00
5.1.05	Belanja Hibah	72.279.255.500,00	92.703.150.500,00	20.423.895.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.280.400.000,00	22.550.400.000,00	270.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	312.820.309.788,00	410.488.780.795,00	97.668.471.007,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	9.222.287.000,00	9.222.287.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.142.263.753,00	120.174.113.403,00	36.031.849.650,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.560.309.165,00	83.659.946.152,00	-11.900.363.013,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.674.493.620,00	177.739.940.100,00	68.065.446.480,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.131.743.250,00	19.461.215.060,00	-3.670.528.190,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	311.500.000,00	231.279.080,00	-80.220.920,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	495.857.240.800,00	497.286.729.000,00	1.429.488.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.192.149.300,00	25.900.000.000,00	-14.292.149.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	455.665.091.500,00	471.386.729.000,00	15.721.637.500,00
	Jumlah Belanja	3.080.300.038.200,00	3.227.089.518.826,00	146.789.480.626,00
	Total Surplus/(Defisit)	-200.616.799.200,00	-161.121.359.521,00	39.495.439.679,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.116.799.200,00	169.621.359.521,00	-44.495.439.679,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.616.799.200,00	168.121.359.521,00	-44.495.439.679,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000,00	8.500.000.000,00	-5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-5.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000,00	8.500.000.000,00	-5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	200.616.799.200,00	161.121.359.521,00	-39.495.439.679,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Tegal,
Bupati

ISCHAK MAULANA ROHMAN



KABUPATEN TEGAL
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	278.476.664.000,00	316.060.598.000,00	1.602.647.201.913,00	1.701.055.926.855,00	259.706.221.387,00	336.638.467.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.353.423.300,00	2.037.694.394.718,00	175.340.971.418,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	980.725.500.623,00	988.781.302.161,00	83.746.054.257,00	77.697.930.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.471.554.880,00	1.066.479.232.420,00	2.007.677.540,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	979.039.741.623,00	987.218.409.454,00	83.746.054.257,00	77.518.159.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.785.795.880,00	1.064.736.568.713,00	1.950.772.833,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00		
2	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.685.759.000,00	1.562.892.707,00	0,00	179.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.759.000,00	1.742.663.707,00	56.904.707,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	278.476.664.000,00	316.060.598.000,00	1.602.647.201.913,00	1.701.055.926.855,00	259.706.221.387,00	336.638.467.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.353.423.300,00	2.037.694.394.718,00	175.340.971.418,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	278.040.597.000,00	315.640.597.000,00	526.669.418.290,00	595.008.112.072,00	38.645.545.110,00	72.420.534.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.314.963.400,00	667.428.646.466,00	102.113.683.066,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	188.300.000,00	188.300.000,00	216.804.072.520,00	180.051.164.201,00	23.068.520.280,00	20.291.920.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.872.592.800,00	200.343.085.021,00	-39.529.507.779,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Danasari	1.684.382.000,00	1.684.382.000,00	1.682.582.000,00	2.240.359.359,00	1.800.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.382.000,00	2.252.509.359,00	568.127.359,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Kesamiran	1.638.000.000,00	1.638.000.000,00	1.638.000.000,00	2.060.550.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000.000,00	2.060.550.930,00	422.550.930,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Margasari	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.676.563.050,00	4.496.083.221,00	123.436.950,00	104.836.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	4.600.920.171,00	800.920.171,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Kesambi	1.910.500.000,00	1.910.500.000,00	1.910.500.000,00	2.497.213.949,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.500.000,00	2.546.213.949,00	635.713.949,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Bumijawa	6.498.880.000,00	6.498.880.000,00	6.048.730.000,00	7.708.329.144,00	450.150.000,00	346.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498.880.000,00	8.055.238.144,00	1.556.358.144,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Bojong	3.066.250.000,00	3.066.250.000,00	3.011.250.000,00	3.896.288.113,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066.250.000,00	3.951.288.113,00	885.038.113,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Balapulang	4.492.000.000,00	4.492.000.000,00	4.480.500.000,00	5.691.441.385,00	11.500.000,00	145.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.000.000,00	5.837.093.385,00	1.345.093.385,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kalibakung	2.326.800.000,00	2.326.800.000,00	2.253.300.000,00	2.921.938.068,00	73.500.000,00	84.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.800.000,00	3.006.258.068,00	679.458.068,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Pagerbarang	2.770.500.000,00	2.770.500.000,00	2.711.500.000,00	3.685.700.324,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.500.000,00	3.744.700.324,00	974.200.324,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Lebaksiu	2.515.552.000,00	2.515.552.000,00	2.441.132.000,00	3.189.563.335,00	74.420.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.552.000,00	3.259.523.335,00	743.971.335,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Kambangan	2.063.455.000,00	2.063.455.000,00	2.063.455.000,00	2.708.667.149,00	0,00	10.703.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.455.000,00	2.719.370.229,00	655.915.229,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Jatinegara	5.150.000.000,00	5.150.000.000,00	4.848.300.000,00	6.035.862.560,00	301.700.000,00	235.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000.000,00	6.271.462.560,00	1.121.462.560,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Kedungbanteng	2.583.132.000,00	2.583.132.000,00	2.521.636.000,00	3.175.434.164,00	61.496.000,00	58.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.132.000,00	3.233.780.164,00	650.648.164,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Pangkah	2.846.865.000,00	2.846.865.000,00	2.796.865.000,00	3.933.918.145,00	50.000.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.865.000,00	4.005.418.145,00	1.158.553.145,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Penusupan	1.955.400.000,00	1.955.400.000,00	1.941.200.000,00	2.615.918.760,00	14.200.000,00	48.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.400.000,00	2.664.578.760,00	709.178.760,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Slawi	2.636.000.000,00	2.636.000.000,00	2.585.000.000,00	3.302.218.709,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.000.000,00	3.353.218.709,00	717.218.709,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Adiwerna	2.683.996.000,00	2.683.996.000,00	2.546.729.000,00	3.436.741.911,00	137.267.000,00	180.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.996.000,00	3.616.976.911,00	932.980.911,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Pagiyanten	2.421.900.000,00	2.421.900.000,00	2.378.174.400,00	3.074.476.163,00	43.725.600,00	43.725.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.900.000,00	3.118.201.763,00	696.301.763,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Talang	1.932.000.000,00	1.932.000.000,00	1.929.000.000,00	2.706.383.439,00	3.000.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.000.000,00	2.720.493.439,00	788.493.439,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Kaladawa	1.738.200.000,00	1.738.200.000,00	1.738.200.000,00	2.563.796.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.200.000,00	2.563.796.777,00	825.596.777,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Dukuhturi	2.216.363.000,00	2.216.363.000,00	2.191.631.000,00	2.913.329.017,00	24.732.000,00	28.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.363.000,00	2.941.437.017,00	725.074.017,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Kupu	1.629.118.000,00	1.629.118.000,00	1.593.943.000,00	2.183.827.067,00	35.175.000,00	35.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.118.000,00	2.219.002.067,00	589.884.067,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Dukuhwaru	3.495.705.500,00	3.495.705.500,00	3.462.705.500,00	4.285.027.535,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.705.500,00	4.318.027.535,00	822.322.035,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Tarub	3.294.458.500,00	3.294.458.500,00	3.186.057.720,00	3.886.769.140,00	108.400.780,00	115.805.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.458.500,00	4.002.574.640,00	708.116.140,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Kramat	1.845.540.000,00	1.845.540.000,00	1.815.540.000,00	2.657.460.536,00	30.000.000,00	88.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.540.000,00	2.746.185.536,00	900.645.536,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Bangungalih	1.746.300.000,00	1.746.300.000,00	1.742.900.000,00	2.339.704.034,00	3.400.000,00	13.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.300.000,00	2.353.586.034,00	607.286.034,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Suradadi	2.086.000.000,00	2.086.000.000,00	2.069.000.000,00	2.813.326.623,00	17.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.000.000,00	2.832.326.623,00	746.326.623,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Jatibogor	1.994.800.000,00	1.994.800.000,00	1.982.800.000,00	2.564.728.740,00	12.000.000,00	8.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.800.000,00	2.572.862.740,00	578.062.740,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Warurejo	4.130.200.000,00	4.130.200.000,00	4.004.162.000,00	4.969.895.794,00	126.038.000,00	126.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.200.000,00	5.095.933.794,00	965.733.794,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD dr. Soeselo	162.400.000.000,00	200.000.000.000,00	186.224.321.100,00	263.396.531.127,00	10.396.003.500,00	46.840.173.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.620.324.600,00	310.236.705.121,00	113.616.380.521,00
1	02	1.02.0.00.0.00.03.0000	RSUD Suradadi	36.300.000.000,00	36.300.000.000,00	46.389.669.000,00	51.005.462.653,00	3.280.080.000,00	3.179.864.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.669.749.000,00	54.185.327.103,00	4.515.578.103,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	420.001.000,00	420.001.000,00	55.093.039.600,00	75.615.582.200,00	135.148.416.020,00	183.748.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.241.455.620,00	259.363.866.000,00	69.122.410.380,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420.001.000,00	420.001.000,00	55.093.039.600,00	75.615.582.200,00	135.148.416.020,00	183.748.283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.241.455.620,00	259.363.866.000,00	69.122.410.380,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.066.000,00	0,00	15.360.282.000,00	17.085.874.571,00	64.456.000,00	541.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424.738.000,00	17.627.330.571,00	2.202.592.571,00
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	16.066.000,00	0,00	14.792.282.000,00	16.601.254.571,00	64.456.000,00	541.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856.738.000,00	17.142.710.571,00	2.285.972.571,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00		
2	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	0,00	568.000.000,00	484.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000.000,00	484.620.000,00	-83.380.000,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	278.476.664.000,00	316.060.598.000,00	1.602.647.201.913,00	1.701.055.926.855,00	259.706.221.387,00	336.638.467.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.353.423.300,00	2.037.694.394.718,00	175.340.971.418,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	16.819.691.400,00	15.746.077.088,00	2.101.750.000,00	2.396.202.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921.441.400,00	18.142.279.338,00	-779.162.062,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	10.712.092.900,00	10.189.167.575,00	1.060.860.000,00	1.277.667.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772.952.900,00	11.466.834.825,00	-306.118.075,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	6.107.598.500,00	5.556.909.513,00	1.040.890.000,00	1.118.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148.488.500,00	6.675.444.513,00	-473.043.987,00		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	10.233.029.000,00	10.866.491.470,00	0,00	13.832.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.029.000,00	10.880.323.630,00	647.294.630,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0,00	0,00	10.233.029.000,00	10.866.491.470,00	0,00	13.832.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233.029.000,00	10.880.323.630,00	647.294.630,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00		
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	19.067.509.000,00	19.908.074.915,00	68.695.000,00	2.734.251.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136.204.000,00	22.642.326.075,00	3.506.122.075,00		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	4.844.376.000,00	4.920.879.940,00	68.695.000,00	231.395.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913.071.000,00	5.152.275.100,00	239.204.100,00		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	14.223.133.000,00	14.987.194.975,00	0,00	2.502.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223.133.000,00	17.490.050.975,00	3.266.917.975,00		
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	61.340.000,00	61.340.000,00	17.774.019.700,00	18.136.235.547,00	325.430.500,00	364.430.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.099.450.200,00	18.500.666.047,00	401.215.847,00		
2	09	2.09.0.00.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61.340.000,00	61.340.000,00	282.214.900,00	247.437.050,00	588.500,00	588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.803.400,00	248.025.550,00	-34.777.850,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.424.734.000,00	1.424.734.000,00	44.543.749.000,00	47.816.440.290,00	4.120.229.700,00	5.074.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.663.978.700,00	52.891.232.990,00	4.227.254.290,00		
3	09	2.09.0.00.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	17.491.804.800,00	17.888.798.497,00	324.842.000,00	363.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816.646.800,00	18.252.640.497,00	435.993.697,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	33.088.181.600,00	32.310.824.269,00	5.182.467.100,00	5.254.851.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.270.648.700,00	37.565.675.969,00	-704.972.731,00		
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	33.088.181.600,00	32.310.824.269,00	5.182.467.100,00	5.254.851.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.270.648.700,00	37.565.675.969,00	-704.972.731,00		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	8.506.773.000,00	8.246.609.400,00	1.167.180.000,00	1.167.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673.953.000,00	9.413.789.400,00	-260.163.600,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	8.506.773.000,00	8.246.609.400,00	1.167.180.000,00	1.167.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673.953.000,00	9.413.789.400,00	-260.163.600,00		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	18.085.026.700,00	17.712.560.005,00	19.986.000,00	687.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105.012.700,00	18.399.915.005,00	294.902.305,00		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	18.085.026.700,00	17.712.560.005,00	19.986.000,00	687.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105.012.700,00	18.399.915.005,00	294.902.305,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.229.540.000,00	1.229.540.000,00	69.314.338.700,00	70.599.682.162,00	3.568.542.600,00	11.855.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882.881.300,00	82.455.010.362,00	9.572.129.062,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1.229.540.000,00	1.229.540.000,00	69.314.338.700,00	70.599.682.162,00	3.568.542.600,00	11.855.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882.881.300,00	82.455.010.362,00	9.572.129.062,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	8.533.780.994,00	7.567.901.261,00	191.650.106,00	481.649.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725.431.100,00	8.049.551.078,00	-675.880.022,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	8.087.828.394,00	7.246.627.744,00	191.650.106,00	481.649.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279.478.500,00	7.728.277.561,00	-551.200.939,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	129.801.000,00	101.550.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.801.000,00	101.550.950,00	-28.250.050,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	316.151.600,00	219.722.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.151.600,00	219.722.567,00	-96.429.033,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.132.156.000,00	10.132.156.000,00	12.664.865.797,00	12.662.439.465,00	2.897.304.703,00	3.755.420.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562.170.500,00	16.417.859.528,00	855.689.028,00		
2	17	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	10.132.156.000,00	10.132.156.000,00	11.974.001.497,00	11.948.664.790,00	588.169.003,00	549.626.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.562.170.500,00	12.498.291.153,00	-63.879.347,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.424.734.000,00	1.424.734.000,00	44.543.749.000,00	47.816.440.290,00	4.120.229.700,00	5.074.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.663.978.700,00	52.891.232.990,00	4.227.254.290,00
3	17	2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	690.864.300,00	713.774.675,00	2.309.135.700,00	3.205.793.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.919.568.375,00	919.568.375,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	6.174.587.500,00	5.253.871.148,00	494.537.000,00	485.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.124.500,00	5.739.822.148,00	-929.302.352,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	6.174.587.500,00	5.253.871.148,00	494.537.000,00	485.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.124.500,00	5.739.822.148,00	-929.302.352,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.875.494.000,00	12.875.494.000,00	18.770.016.800,00	19.318.795.565,00	1.007.002.000,00	1.050.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.777.018.800,00	20.369.402.565,00	592.383.765,00
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.875.494.000,00	12.875.494.000,00	5.540.313.000,00	5.429.390.000,00	24.687.000,00	24.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.000.000,00	5.454.077.000,00	-110.923.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.424.734.000,00	1.424.734.000,00	44.543.749.000,00	47.816.440.290,00	4.120.229.700,00	5.074.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.663.978.700,00	52.891.232.990,00	4.227.254.290,00
3	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	13.229.703.800,00	13.889.405.565,00	982.315.000,00	1.025.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212.018.800,00	14.915.325.565,00	703.306.765,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	5.077.417.700,00	4.291.847.185,00	1.247.751.000,00	1.247.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325.168.700,00	5.539.598.185,00	-785.570.515,00
2	24	2.24.2.23.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	4.823.467.700,00	4.086.875.835,00	1.247.751.000,00	1.247.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071.218.700,00	5.334.626.835,00	-736.591.865,00
2	24	2.24.2.23.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	253.950.000,00	204.971.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.950.000,00	204.971.350,00	-48.978.650,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.424.734.000,00	1.424.734.000,00	44.543.749.000,00	47.816.440.290,00	4.120.229.700,00	5.074.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.663.978.700,00	52.891.232.990,00	4.227.254.290,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	170.572.000,00	170.572.000,00	4.440.543.700,00	4.220.446.031,00	455.172.000,00	430.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895.715.700,00	4.650.918.031,00	-244.797.669,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	170.572.000,00	170.572.000,00	4.440.543.700,00	4.220.446.031,00	455.172.000,00	430.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895.715.700,00	4.650.918.031,00	-244.797.669,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.428.530.000,00	29.428.530.000,00	189.486.435.791,00	187.189.669.092,00	12.554.253.309,00	24.668.990.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.040.689.100,00	211.858.659.832,00	9.817.970.732,00		
2	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.254.162.000,00	1.254.162.000,00	10.279.364.600,00	12.729.309.722,00	48.765.000,00	48.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328.129.600,00	12.778.074.722,00	2.449.945.122,00		
2	31	3.31.3.32.2.07.11.0000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	1.588.532.200,00	1.625.294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.532.200,00	1.625.294.200,00	36.762.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.424.734.000,00	1.424.734.000,00	44.543.749.000,00	47.816.440.290,00	4.120.229.700,00	5.074.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.663.978.700,00	52.891.232.990,00	4.227.254.290,00		
3	31	3.31.3.32.2.07.11.0000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.254.162.000,00	1.254.162.000,00	8.640.832.400,00	11.100.557.022,00	48.765.000,00	48.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689.597.400,00	11.149.322.022,00	2.459.724.622,00		
3	31	3.31.3.32.2.07.11.0000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	50.000.000,00	3.458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	3.458.500,00	-46.541.500,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	155.880.156.920,00	149.044.820.802,00	16.078.994.180,00	21.181.502.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.959.151.100,00	170.226.322.982,00	-1.732.828.118,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	70.384.566.800,00	73.743.963.484,00	6.705.698.000,00	9.746.626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.090.264.800,00	83.490.590.084,00	6.400.325.284,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	70.384.566.800,00	73.743.963.484,00	6.705.698.000,00	9.746.626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.090.264.800,00	83.490.590.084,00	6.400.325.284,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	85.495.590.120,00	75.300.857.318,00	9.373.296.180,00	11.434.875.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.868.886.300,00	86.735.732.898,00	-8.133.153.402,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	85.495.590.120,00	75.300.857.318,00	9.373.296.180,00	11.434.875.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.868.886.300,00	86.735.732.898,00	-8.133.153.402,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	396.949.405.000,00	383.644.098.000,00	196.183.503.300,00	165.380.309.919,00	2.846.245.300,00	4.356.596.700,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	495.857.240.800,00	497.286.729.000,00	704.886.989.400,00	670.023.635.619,00	-34.863.353.781,00		
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	9.930.925.600,00	8.345.526.825,00	1.009.164.000,00	1.231.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940.089.600,00	9.577.239.325,00	-1.362.850.275,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	7.682.685.600,00	6.339.591.925,00	1.009.164.000,00	1.231.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691.849.600,00	7.571.304.425,00	-1.120.545.175,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	2.248.240.000,00	2.005.934.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.240.000,00	2.005.934.900,00	-242.305.100,00		
5	02		KEUANGAN	396.949.405.000,00	383.644.098.000,00	174.724.463.700,00	146.378.078.248,00	1.713.575.300,00	2.800.210.500,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	495.857.240.800,00	497.286.729.000,00	682.295.279.800,00	649.465.017.748,00	-32.830.262.052,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	26.882.796.000,00	36.556.465.000,00	154.321.548.700,00	126.705.979.550,00	1.688.575.300,00	2.446.132.500,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	495.857.240.800,00	497.286.729.000,00	661.867.364.800,00	629.438.841.050,00	-32.428.523.750,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	370.066.609.000,00	347.087.633.000,00	20.402.915.000,00	19.672.098.698,00	25.000.000,00	354.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427.915.000,00	20.026.176.698,00	-401.738.302,00		
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	11.528.114.000,00	10.656.704.846,00	123.506.000,00	324.673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651.620.000,00	10.981.378.546,00	-670.241.454,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	8.007.738.000,00	7.445.497.846,00	123.506.000,00	324.673.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131.244.000,00	7.770.171.546,00	-361.072.454,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	3.520.376.000,00	3.211.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.376.000,00	3.211.207.000,00	-309.169.000,00		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	12.618.463.900,00	11.171.217.207,00	2.179.555.000,00	2.179.764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798.018.900,00	13.350.981.407,00	-1.447.037.493,00		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	12.618.463.900,00	11.171.217.207,00	2.179.555.000,00	2.179.764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798.018.900,00	13.350.981.407,00	-1.447.037.493,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	0,00	12.618.463.900,00	11.171.217.207,00	2.179.555.000,00	2.179.764.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.798.018.900,00	13.350.981.407,00	-1.447.037.493,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	166.319.000,00	166.319.000,00	49.957.695.988,00	45.185.949.702,00	14.861.078.912,00	15.478.928.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.818.774.900,00	60.664.878.114,00	-4.153.896.786,00		
7	01		KECAMATAN	166.319.000,00	166.319.000,00	49.957.695.988,00	45.185.949.702,00	14.861.078.912,00	15.478.928.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.818.774.900,00	60.664.878.114,00	-4.153.896.786,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00	2.530.698.500,00	2.324.763.500,00	360.762.000,00	360.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.460.500,00	2.685.525.500,00	-205.935.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Balapulang	0,00	0,00	2.603.788.760,00	2.463.384.178,00	419.190.040,00	427.340.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.978.800,00	2.890.724.218,00	-132.254.582,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Bojong	0,00	0,00	2.417.257.200,00	2.252.394.975,00	479.512.000,00	501.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.769.200,00	2.753.981.975,00	-142.787.225,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00	2.350.038.000,00	2.437.979.500,00	381.022.000,00	377.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.060.000,00	2.815.001.500,00	83.941.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Dukuhturi	0,00	0,00	2.565.030.000,00	2.152.318.100,00	330.932.000,00	330.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.962.000,00	2.483.250.100,00	-412.711.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Dukuhwaru	0,00	0,00	2.213.234.300,00	1.804.353.050,00	393.232.000,00	393.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.466.300,00	2.197.585.050,00	-408.881.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Jatinegara	0,00	0,00	2.042.747.000,00	2.014.754.692,00	455.802.000,00	452.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.549.000,00	2.467.626.692,00	-30.922.308,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	2.481.545.400,00	2.256.691.900,00	377.219.000,00	404.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.764.400,00	2.660.884.900,00	-197.879.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kramat	36.000.000,00	36.000.000,00	3.389.624.400,00	3.090.164.000,00	1.749.552.000,00	1.703.921.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.176.400,00	4.794.085.500,00	-345.090.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Lebaksiu	0,00	0,00	2.388.882.400,00	2.117.590.856,00	379.942.000,00	374.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.824.400,00	2.492.551.856,00	-276.272.544,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Margasari	0,00	0,00	2.732.109.000,00	2.609.346.800,00	1.260.417.500,00	1.254.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.526.500,00	3.863.764.300,00	-128.762.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Pagerbarang	0,00	0,00	2.043.870.400,00	1.937.446.000,00	671.173.000,00	669.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.043.400,00	2.606.830.000,00	-108.213.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Pangkah	0,00	0,00	2.387.650.800,00	2.188.310.150,00	401.070.000,00	401.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.720.800,00	2.589.380.150,00	-199.340.650,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Slawi	130.319.000,00	130.319.000,00	8.246.167.040,00	7.516.208.812,00	5.200.854.160,00	5.535.460.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447.021.200,00	13.051.668.972,00	-395.352.228,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Suradadi	0,00	0,00	2.186.167.800,00	1.694.116.650,00	390.932.000,00	416.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.099.800,00	2.110.348.650,00	-466.751.150,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Talang	0,00	0,00	2.465.844.488,00	2.159.469.988,00	607.924.512,00	639.136.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.769.000,00	2.798.606.500,00	-275.162.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Tarub	0,00	0,00	2.496.716.900,00	2.113.527.900,00	606.810.700,00	833.523.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.527.600,00	2.947.051.600,00	-156.476.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Warurejo	0,00	0,00	2.416.323.600,00	2.053.128.651,00	394.732.000,00	402.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.055.600,00	2.456.010.651,00	-355.044.949,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	10.305.280.800,00	9.469.675.164,00	473.732.000,00	909.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779.012.800,00	10.379.413.164,00	-399.599.636,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	10.305.280.800,00	9.469.675.164,00	473.732.000,00	909.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779.012.800,00	10.379.413.164,00	-399.599.636,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	10.305.280.800,00	9.469.675.164,00	473.732.000,00	909.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779.012.800,00	10.379.413.164,00	-399.599.636,00
			TOTAL	706.445.652.000,00	730.724.279.000,00	2.261.622.487.612,00	2.316.314.009.031,00	312.820.309.788,00	410.488.780.795,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	495.857.240.800,00	497.286.729.000,00	3.080.300.038.200,00	3.227.089.518.826,00	146.789.480.626,00

Kab. Tegal,

Bupati

ISCHAK MAULANA ROHMAN